

Volume 28, Nomor 2, Juli - September 2015
Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014

ISSN: 0215 - 7829

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA
2015

DARI MEJA REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu kami terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas terbitan dan cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 9 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 2, Juli-September 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.

Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Juli 2015
Dewan Redaksi

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 28, Nomor 2, Juli - September 2015
Halaman 173 - 350

DAFTAR ISI

PERAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM MEMBINA KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA: STUDI KASUS PADA MAJELIS PANDITA BUDDHA MAITREYA
KOTA BATAM

Novi Dwi Nugroho ----- 331 - 346

**PERAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM MEMBINA KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA: STUDI KASUS PADA MAJELIS PANDITA BUDDHA
MAITREYA KOTA BATAM**

***THE ROLE OF RELIGIOUS INSTITUTIONS IN PROMOTING RELIGIOUS
HARMONY: A CASE STUDY OF MAJLIS PANDITA BUDDHA MAITREYA
BATAM CITY***

NOVI DWI NUGROHO

Novi Dwi Nugroho

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo
Gebang, Cakung, Jakarta
Timur (13950)
email: novdwinu@gmail.com
Naskah Diterima:
Tanggal 25 Agustus 2015.
Revisi 26 Agustus-3
September 2015.
Disetujui 5 September 2015.

Abstract

This paper presents the results of research on the role of Majelis Pandita Buddha Maitreya (Mapanbumi) Batam. This research seeks to answer on how Mapanbumi' views or attitudes toward religious harmony and what programs or activities that this majlis conduct concerning religious harmony. Using a case study model, data were collected through interviews, documents analysis, observations, and focus group discussions. The study found that according to Mapanbumi Batam, the religious harmony is something that has to be fought by all humans, regardless of race, ethnicity, culture, and religion, since all human beings are principally brothers. Mapanbumi Batam undertakes programs or activities in the field of inter-religious harmony through establishing public schools Maitreya Wira based on Buddhism Maitreya philosophy. This institution also run other social activities, including providing assistance to Al-Fateh rehabilitation institution, carrying out blood donation program, setting up vegetarian festival, and celebrating cultural and religious festivals which open to the public.

Keywords: Religious Institutions, Mapanbumi, Harmony, the city of Batam, Buddha

Abstrak

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian mengenai peran Majelis Pandita Buddha Maitreya (Mapanbumi) Kota Batam. Penelitian ini hendak menjawab bagaimana pandangan atau sikap serta program atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Mapanbumi Kota Batam mengenai kerukunan umat beragama. Dengan menggunakan model studi kasus, data penelitian digali menggunakan metode wawancara, studi dokumen, observasi, dan kelompok diskusi terfokus. Penelitian ini mendapati, bahwa kerukunan umat beragama bagi Mapanbumi Kota Batam adalah hal yang harus diperjuangkan oleh semua manusia walaupun berbeda suku, etnis, budaya, dan agama, karena pada prinsipnya semua manusia adalah saudara. Program atau kegiatan yang dilakukan oleh Mapanbumi Kota Batam dalam bidang kerukunan antar umat beragama adalah dengan mendirikan sekolah Maitreya Wira yang berfalsafah Budhisme Maitreya, tapi terbuka untuk umum. Kegiatan sosial yang lain adalah dengan memberikan bantuan kepada panti rehabilitasi Al-Fateh, kegiatan donor darah, festival vegetarian, dan perayaan-perayaan hari besar yang terbuka untuk umum.

Kata Kunci: Lembaga Keagamaan, Mapanbumi, Kerukunan, Kota Batam, Buddha

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar yang sangat majemuk. Ini bisa dilihat dari luasnya wilayah yang terdiri dari 13.487 buah pulau (Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi 2010), dan jumlah penduduknya 237.641.326 (sensus penduduk 2010) serta latar belakang warga negaranya yang terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, dan latar belakang budaya. Hal ini adalah potensi yang sangat besar baik yang bersifat positif atau negatif. Potensi positifnya adalah apabila potensi yang sangat luar biasa ini bisa dikelola dengan baik, maka bangsa Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan besar, tetapi apabila kemajemukan ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan perpecahan, terutama isu-isu yang berkaitan dengan agama, karena agama adalah masalah keyakinan yang apabila terjadi sedikit saja percikan atau gesekan maka akan dengan cepat menjadi konflik sosial keagamaan yang akibatnya fatal.

Untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, tetapi kewajiban seluruh warga negara. Mulai dari tanggung jawab mengenai ketentraman, keamanan, dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, antar umat beragama. Sikap tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama merupakan indikasi dari konsep tri kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan intern umat beragama (kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut seagama), kerukunan antar umat beragama (kerukunan yang terjalin antar masyarakat

yang memeluk agama yang berbeda) dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah (yaitu bentuk kerukunan semua umat-umat beragama dengan pemerintah).

Dalam upaya memantapkan kerukunan itu, hal serius yang harus diperhatikan adalah fungsi lembaga keagamaan yang merupakan wadah dan perwakilan dari umatnya. Lembaga-lembaga keagamaan ini harus bisa mengayomi, menjembatani permasalahan-permasalahan, baik internal umatnya maupun dengan umat agama lain. Kemudian pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab demi terwujud dan terbinanya kerukunan hidup umat beragama, sehingga pemerintah dan lembaga keagamaan merupakan pelayan, mediator, dan fasilitator apabila terjadi permasalahan-permasalahan menyangkut keagamaan.

Untuk menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama diperlukan upaya dan usaha yang sungguh-sungguh dan dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, baik dari umat beragama itu sendiri, lembaga-lembaga keagamaan yang di dalamnya ada tokoh atau pemuka agama, tokoh masyarakat serta pemerintah yang berwenang. Fungsi lembaga keagamaan amat penting pada setiap agama atau kepercayaan masyarakat Indonesia. Lembaga keagamaan pada intinya juga berfungsi sebagai alat pemersatu saja. Tak hanya pemersatu dalam hal edukasi (pemahaman dan pengamalan) keagamaan, melainkan juga sebagai pencipta harmoni antar umat beragama atau kepercayaan terhadap umat beragama lainnya pada aspek-aspek kehidupan sosial (politik, ekonomi, budaya, keamanan, dan sebagainya). Robert Putnam melalui teori modal sosialnya menyebutkan,

bahwa, lembaga keagamaan bisa juga disebut sebagai modal sosial (Inglehart dan Norris 2009, 218-223). Keberadaan lembaga agama menjadi penjawab dari sejumlah desas-desus (isu) keagamaan yang muncul seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan.

Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu di Indonesia juga memiliki sejumlah lembaga keagamaan yang dijadikan wadah pemersatu umat atau berfungsi sebagai mediator antara agamanya dengan kebutuhan religi masyarakat atau bahkan dapat difungsikan sebagai mediator dengan pemerintah. Bisa dikatakan lembaga ini berskala nasional, karena cakupan wilayahnya hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya, masyarakat Indonesia secara umum sudah pasti mengenal masing-masing lembaga keagamaannya. Sebagian umat Muslim mengenal Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Majelis Ulama Indonesia, dan lembaga keagamaan lainnya. Sebagian umat Krisntiani mengenal Konferensi Wali gereja Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia. Sebagian umat Hindu mengenal Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sebagian umat Buddha juga mengenal Majelis Buddha Indonesia dan Wali Umat Buddha Indonesia. Sebagian umat Konghuchu mengenal Majelis Tinggi Konghuchu Indonesia.

Lembaga-lembaga keagamaan juga sejak dahulu sudah turut membantu peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dalam bernegara dan berbangsa. Lembaga-lembaga keagamaan ini pula yang mewarnai perkembangan Indonesia menjadi negara yang majemuk. Di Indonesia banyak lembaga keagamaan yang telah ada sejak sebelum negara ini diproklamirkan.

Lembaga-lembaga ini turut serta berjuang membebaskan negeri ini dari belenggu penjajahan dan membantu berdirinya sebuah negara bernama Indonesia yang majemuk (Ricklefs 2008).

Terkait dengan lembaga keagamaan, Balai Litbang Agama Makassar pada 2009 telah melakukan kajian terhadap potensi NU (Nahdlatul Ulama) di wilayah Indonesia Timur. Salah satu hasil penelitian mereka di Sulawesi Utara menunjukkan, bahwa lembaga keagamaan NU di sana dapat dikategorikan menjadi tiga model, yakni: konservatif, moderat, dan liberal. Tiga kategori ini didasarkan pada pendapat beberapa tokoh NU di sana yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu keagamaan mengenai fenomena munculnya aliran yang dipandang sesat di beberapa wilayah Indonesia (Balai Litbang Agama Makassar 2009).

Selain itu, para peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat juga pernah melakukan penelitian terkait dengan dinamika kehidupan beragama di era reformasi. Salah satu judul yang menyoal tentang peran lembaga adalah tentang "Peran dan Hubungan LSM dengan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan" yang ditulis oleh Akmal Salim Ruhana. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa LSM yang memfokuskan geraknya pada perihal kerukunan (Setara Institut, Wahid Institut, dan ICRP) memiliki sejumlah program yang mengarah pada pemeliharaan kerukunan umat beragama (Ahmad, 2010, 30-54). Namun, itu sebatas paparan program, bagaimana dengan realisasinya? Apakah memang benar program tersebut dijalankan, hal itu tidak dijelaskan pada penelitian tersebut.

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan, bahwa mengkaji sebuah lembaga keagamaan menarik untuk senantiasa dilakukan. Mengapa? Karena, tak dapat dihindari, masing-masing lembaga keagamaan yang ada Indonesia mengalami pasang surut (dinamika) dalam kiprahnya mewujudkan harmonisasi antar sesama umatnya. Lembaga keagamaan memiliki peran tersendiri dalam ranah kehidupan sosial. Lembaga keagamaan memiliki andil besar dalam menyikapi isu toleransi inter dan antar umat beragama. Lembaga keagamaan juga memiliki andil dalam memastikan hak-hak beragama dapat terpenuhi. Dua isu keagamaan ini kerap menjadi titik tengkar antara negara dan masyarakat (Kholiludin 2009, 249). Pada intinya, lembaga keagamaan semestinya menjawab sejumlah isu-isu keagamaan yang senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kota Batam yang sangat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan etnis, suku yang dominan antara lain Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, Flores, dan Tionghoa walaupun masih banyak lagi suku-suku dan etnis yang bermukim di Kota Batam. Dilihat dari agama, penduduk Kota Batam juga sangat heterogen. Ini bisa dilihat dari jumlah dan prosentase pemeluk agamanya, yaitu Islam (71,00 %), diikuti oleh penganut Kristen (18,80%), Budha (6,58%), Katolik (3,39%), Hindu (0,11%) dan Konghucu (0,10%).

Lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Kota Batam juga cukup banyak; ada 62 lembaga keagamaan (data Kementerian Agama Kota Batam), namun setelah melakukan berbagai penelusuran dan mencari informasi dari berbagai pihak yang ada di Kota Batam terutama informasi dari Kementerian Agama dan Kesbang Linmas

Pol Kota Batam, dan setelah mendatangi lembaga-lembaga keagamaan yang telah direkomendasikan tersebut dan melakukan wawancara dengan para pengurus lembaga-lembaga keagamaan yang telah didatangi, maka penulis melihat satu lembaga keagamaan, yaitu Majelis Pandita Buddha Maitreya (Mapanbumi) yang ada di Kota Batam yang mempunyai kantor atau sekretariat di Maha Vihara Maitreya Batam. Informasi awal yang didapat, bahwa Mapanbumi Kota Batam sudah melakukan program atau kegiatan yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Sehingga ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melihat lebih jauh lagi keberadaan dan peran dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam terutama dalam menjaga dan membina kerukunan umat beragama.

Lembaga keagamaan di antaranya berperan sebagai perwakilan dari sejumlah umat beragama yang ada di Indonesia dalam menyikapi sejumlah isu-isu keagamaan yang berkembang dan senantiasa mengalami pasang surut perubahan. Isu-isu keagamaan juga senantiasa mengalami perubahan pada setiap daerah-daerah di Indonesia, seiring berkembangnya aspek-aspek strategis pada kehidupan sosial (politik, budaya, ekonomi, keamanan, dan sebagainya), sehingga guna memfungsikan perannya, lembaga keagamaan memiliki andil besar dalam menentukan sikap dari sejumlah isu-isu keagamaan terutama masalah kerukunan umat beragama, yang muncul pada setiap daerah di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah, ingin mengetahui pandangan atau sikap dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam mengenai kerukunan umat beragama dan ingin mengetahui Program atau kegiatan

apa saja yang dilakukan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam yang mencerminkan kerukunan umat beragama.

Kerangka Konsep

Lembaga Keagamaan

Lembaga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, atau tumbuhan); bentuk (rupa, wujud) yang asli; acuan; ikatan; badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan usaha; pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan (KBBI edisi III). Keagamaan adalah perihal yang berhubungan dengan agama (KBBI edisi III). Sehingga, lembaga keagamaan dapat dimaknai sebagai badan atau organisasi yang terkait dengan perihal keagamaan.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.

Kerukunan Umat Beragama

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 menyatakan, bahwa

kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Teori Fungsional

Teori fungsional memandang masyarakat sebagai suatu lembaga sosial yang berada dalam keseimbangan; yang memolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut bersama dan dianggap sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Lembaga-lembaga yang kompleks ini secara keseluruhan merupakan sistem sosial yang sedemikian rupa yang mana setiap bagian (masing-masing unsur kelembagaan itu) saling tergantung dengan semua bagian lain, sehingga perubahan salah satu bagian akan mempengaruhi bagian lain yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sistem keseluruhan (O'DEA 1985, 3).

Teori fungsional melihat manusia dalam masyarakat ditandai oleh dua tipe kebutuhan dan dua jenis kecenderungan bertindak. Demi kelanjutan hidupnya, manusia harus bertindak terhadap lingkungan, baik dengan cara menyesuaikan diri pada lingkungan itu atau menguasai dan mengendalikannya.

Wallace dan Alison (dalam Ritzer 1992, 25) mengatakan, bahwa para penganut pendekatan fungsional melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling

tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (*equilibrium*). Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis.

Teori ini menyatakan, bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain (Ritzer 1992, 25).

Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya, kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Secara ekstrem penganut teori ini beranggapan, bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat (Ritzer 1992, 25).

Lawer (1987) mengatakan, bahwa teori fungsional ini mendasarkan pada tujuh asumsi, yaitu: (1) masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi; (2) hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik; (3) sistem sosial yang ada bersifat dinamis; penyesuaian yang ada tidak perlu banyak mengubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh; (4) integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, sehingga di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan

dan penyimpangan-penyimpangan, tetapi ketegangan dan penyimpangan ini akan dinetralisasi lewat proses pelembagaan; (5) perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian; (6) perubahan merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi; dan (7) sistem diintegrasikan lewat pemilihan nilai-nilai yang sama (Zamroni 1988, 105-6).

Teori struktural fungsional menyatakan, masyarakat sebagai suatu sistem memiliki struktur yang terdiri atas banyak lembaga. Masing-masing lembaga memiliki fungsi sendiri-sendiri. Struktur dan fungsi dengan kompleksitas yang berbeda-beda ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif. Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada pada generasi baru. Lembaga keluarga berfungsi menjaga kelangsungan perkembangan jumlah penduduk. Lembaga politik berfungsi menjaga tatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebagaimana mestinya. Semua lembaga tersebut akan saling berinteraksi dan saling menyesuaikan yang mengarah pada keseimbangan. Bila terjadi penyimpangan dari suatu lembaga masyarakat, maka lembaga yang lainnya akan membantu dengan mengambil langkah penyesuaian (Zamroni 1988, 27).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan model yang digunakan adalah studi kasus, sehingga pemilihan lembaga keagamaan dan setiap sumber informasi pendukung melalui metode wawancara,

studi dokumen, observasi, dan *focus group discussion*, menjadi kumpulan material yang dapat menggambarkan secara detail dari kasus yang dikaji (Djam'an dan Komariah 2010, 36).

Data yang digali dengan wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Urusan Islam (Kasi Urais), Kasi urusan agama Kristen, Buddha, Hindu yang ada di Kemenag Kota Batam. Wawancara juga dilakukan dengan para pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Batam, pengurus PGI, PHDI, Walubi Kota Batam untuk mendapatkan data awal atau informasi tentang keberadaan dari lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Kota Batam, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masing-masing lembaga keagamaan tersebut dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama.

Studi dokumen dilakukan dengan mengambil data yang ada Kantor Kementerian (Kemenag) Kota Batam, Kesbang Linmas Pol Kota Batam, yang menelusuri tentang keberadaan dari lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Kota Batam. Kemudian mengambil data di Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia Kota Batam yang menjadi lokus penelitian mengenai program atau kegiatan yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama.

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu observasi yang melibatkan peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi, peneliti bertindak sebagai observer, artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya hal ini

dilakukan untuk memperoleh data sarana prasarana dan data pelengkap tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia Kota Batam dalam rangka kerukunan umat beragama. Terutama observasi di sekolah Maitreya Wira yang merupakan sekolah swasta yang berfalsafah Budhisme Maitreya, tetapi di dalamnya terdapat siswa, staf pengajar serta para pegawainya yang mempunyai latar belakang agama yang berbeda, bagaimana mereka berinteraksi dan bekerjasama walaupun berbeda keyakinan.

Kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*/FGD) dilakukan dengan para pengurus dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia Kota Batam untuk memperdalam lagi data yang sudah diperoleh tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh lembaga keagamaan ini yang mencerminkan kerukunan antar umat beragama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Selayang Pandang Kota Batam

Kota Batam adalah kota terbesar di Kepulauan Riau dan merupakan kota dengan populasi terbesar ketiga di wilayah Sumatera setelah Medan dan Palembang, Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Per April 2012, bahwa jumlah penduduk Batam mencapai 1.153.860 jiwa. Kota Batam terdiri dari tiga pulau, yaitu Batam, Rempang dan Galang yang dihubungkan oleh Jembatan Bareleng. Batam merupakan sebuah kota dengan letak sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki

jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia. Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an awal kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat.

Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam.

Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam.

Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kotamadya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam.

Masyarakat Kota Batam merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan. Suku yang

dominan antara lain Melayu, Jawa, Batak, Minangkabau, dan Tionghoa. Dengan berpayungkan Budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, Batam menjadi kondusif dalam mengerjakan kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat. Hingga April 2012, Batam telah berpenduduk 1.153.860 jiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga April 2012 memiliki angka pertumbuhan penduduk rata-rata lebih dari 8 persen per tahun.

Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia Kota Batam

Ajaran Buddha Maitreya muncul di Indonesia pada tahun 1949 oleh Maha Seseput Maitreyawira, atas cinta kasih dari Ibunda Suci melalui seseput Phan Hwa Ling, M.S Maitreyawira menerima firman kependitaan ini. Seiring masa yang semakin mendesak, maka Ibunda Suci mengutus M.S Maitreyawira menuju pulau Jawa di Indonesia untuk merintis wadah Ketuhanan dan menyelamatkan umat manusia karena banyak umat manusia bajik dan berjodoh Buddha, dan dalam perjalanan itu beliau bertemu seseput Fuh Ik Chun "Seseput Gautama Harjono" (DPP Mapanbumi "Buku Kenangan Peresmian Pusdiklat Buddhis Maitreyawira," 56).

Setelah tiba di Indonesia, M.S Maitreyawira berjuang keras untuk membangun vihara dan pada tahun 1950 diresmikan vihara pertama Chiao Kuang di Kota Malang, Jawa Timur.

Dengan perjuangan yang terus menerus, maka wadah Ketuhanan terus berkembang,

pada tahun 1954 Seseputh Yang Chai Khui mendirikan vihara Sun Ming di Jakarta. Di vihara ini berhasil dicetak kader-kader tulus dan berjodoh kebuddhaan. Misalnya, Seseputh Yang Sui Yen yang merintis Wadah Ketuhanan di Sumatera Utara dan Riau, kemudian Pandita Lin Cung Lan yang mendirikan vihara di Pontianak, Pandita Lin Cin Hong yang mendirikan vihara Cen kuang di Tambora Jakarta.

Sejak merintis Wadah Ketuhanan di Indonesia, M.S Maitreyawira berjuang keras ke seluruh penjuru demi menyelamatkan umat manusia hingga terlalu letih dan jatuh sakit. Keadaannya ini diketahui oleh Ibunda Suci kemudian mengutus tiga Maha Seseputh senior untuk membantu M.S Maitreyawira membentuk Dewan Seseputh. Kemudian mereka berunding untuk menentukan penerus Wadah Ketuhanan di Indonesia. Mereka sepakat bahwa Seseputh Fuh Ik Chun yang menjadi seseputh penerus.

Pada tahun 1982, M.S Maitreyawira menulis surat mandat yang mengangkat Seseputh Fuh Ik Chun (Seseputh Gautama Harjono) sebagai pemimpin Wadah Ketuhanan di Indonesia menggantikan beliau. Pada tahun 1983, M.S Maitreyawira kembali ke sisi Tuhan dalam usia 90 tahun, selama 30 tahun lebih beliau berjaung merintis dan mengembangkan Wadah Ketuhanan di Indonesia, budi kasihnya menerangi semua umat Maitreya di Indonesia (DPP Mapanbumi "Buku Kenangan Peresmian Pusdiklat Buddhis Maitreyawira," 57).

Profil Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia Kota Batam

Majelis agama Buddha ini bernama Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia disingkat menjadi Mapanbumi. Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia didirikan pada tanggal 7 Agustus 1975 di Malang untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Dewan Pengurus Pusat Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Untuk di Kota Batam sendiri, Majelis Pandita Buddha Maitreya berdiri pada tahun 1984. Pada saat ini, kantor atau sekretariat Mapanbumi Kota Batam berada di Maha Vihara Duta Maitreya yang beralamat di Jalan Bukit Beruntung, Sei Panas Batam Centre dan pada saat ini penganut atau umat dari Buddha Maitreya yang ada di Kota Batam berjumlah 15.000 orang (wawancara dengan sekretaris umum Mapanbumi Kota Batam Pandita Liyas Masri tanggal 23 Maret 2014).

Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia bersifat organisasi keagamaan Buddha. Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia bertujuan antara lain:

1. Menyebarluaskan dan mengembangkan agama Buddha.
2. Membina umat Buddha menjadi umat Buddha yang beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Buddha dan Bodhisatva serta mempunyai kesadaran beragama yang tinggi, memiliki mental dan spiritual serta budi pekerti yang luhur.
3. Membina umat Buddha sebagai warga negara Indonesia untuk dapat menjadi umat Buddha yang dapat menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai

dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

4. Membina dan meningkatkan, penghayatan dan pengamalan para Pandita Buddha Maitreya mengenai agama Buddha serta keterampilannya sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam membimbing umat Buddha Maitreya sesuai dengan ajaran para Buddha dan Bodhisatva.
5. Membina persaudaraan sesama umat manusia tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, demi terwujudnya kerukunan dan kerja sama yang sebaik-baiknya.

Usaha untuk mencapai tujuan Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia adalah:

1. Mengadakan pengangkatan pandita dan dhiksa umat Buddha Maitreya, mendirikan dan memelihara vihara-vihara, cetya-cetya Buddha Maitreya.
2. Mengadakan persembahyangan, khotbah-khotbah dan ceramah-ceramah agama Buddha.
3. Menterjemahkan kitab suci agama Buddha, menyusun buku-buku dan menerbitkan kitab suci dan buku agama serta majalah, brosur dan menyebarkannya.
4. Mengadakan penataran untuk Pandita dan umat Buddha Maitreya, mendirikan sekolah-sekolah, menyelenggarakan diklat dan kursus-kursus.
5. Menjaga kelestarian, kerukunan intern umat beragama Buddha, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

Pandangan Mengenai Kerukunan Umat beragama

Pandangan atau sikap dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam mengenai kerukunan umat beragama adalah hal yang harus diperjuangkan oleh semua manusia tidak memandang latar belakang agama, suku, etnis, dan budaya, karena pada prinsipnya semua makhluk di dunia ini adalah saudara, ini sesuai dengan yang diajarkan oleh sang Buddha. Dengan falsafah hidup yang demikian, maka bagi umat Buddha khususnya Buddha Maitreya, bahwa semua manusia yang ada di dunia ini adalah saudara. Ini diwujudkan dengan istilah keindahan kodrati manusia, manusia dewasa ini hidup dalam persaingan, fanatisme, dan materialisme. Pencapaian hidup diukur dengan materi, kedudukan, sehingga tingkat stres meningkat, depresi sudah dialami para remaja, bahkan anak-anak. Persaingan yang tidak berkesudahan tidak memberikan kebahagiaan kepada manusia. Demikian juga dengan sandang, pangan, papan, dan transportasi hanyalah sebagai sarana pendukung dalam proses menjalani kehidupan, bukan segala-galanya, bukan tujuan hidup kita. Konsep hidup, kehidupan, dan kelangsungan hidup yang keliru, konsep beragama dan gaya hidup yang tidak seimbang, konsep nilai dan keindahan yang menyimpang, telah mengakibatkan manusia gagal dalam mewujudkan keindahan kodratinya. Melihat kenyataan tersebut, Y.M. Wang Tzu Kuang, Pendiri *The International Nature Loving Federation* menyatakan: "Hanya dengan mewujudkan Keindahan Kodrati Manusia, maka terciptalah hidup yang bahagia-leluasa dan penuh makna, Keluarga yang harmonis sejahtera, Masyarakat yang rukun damai,

Bangsa yang makmur sentosa dan Dunia yang damai-bahagia". Dengan prinsip hidup yang seperti itu, maka harus diwujudkan dengan cara: menghargai harkat dan martabat diri; menjunjung tinggi setiap nilai kehidupan; mencintai alam; mewujudkan dunia satu keluarga.

Dengan falsafah hidup yang seperti itu, maka Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam memberikan ceramah-ceramah keagamaan yang dilakukan oleh para pandita kepada penganut Buddha Maitreya yang ada di Kota Batam untuk mencintai dan menyayangi semua makhluk hidup yang ada didunia ini dengan prinsip "semua makhluk satu keluarga". Dengan demikian, akan tercipta suatu keadaan yang rukun dan damai di antara masyarakat Kota Batam yang heterogen. Prinsip kami apalagi dengan sesama manusia dengan sesama makhluk hidup yang lain pun harus saling menyayangi, bagi kami semua manusia adalah saudara walaupun berbeda agama, suku, etnis dan budaya (wawancara dengan sekretaris umum Mapanbumi Kota Batam Pandita Liyas Masri tanggal 23 Maret 2014).

Kegiatan-kegiatan yang Mencerminkan Kerukunan Umat Beragama

Maha Vihara Maitreya Batam yang berada di bawah naungan Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam ini mempunyai dua kegiatan utama, yaitu kegiatan keagamaan dan kegiatan non keagamaan. Kegiatan keagamaan terdiri dari: kebaktian, bimbingan rohani, diklat kaderisasi, diklat pelajar, sekolah minggu dan kelas etika ritual. Sedangkan kegiatan non keagamaan adalah adanya pendidikan umum, yaitu

dengan adanya sekolah Maitreya Wira, kegiatan sosial, seperti membantu sebuah panti rehabilitasi Al-Fateh yang notabenenya adalah sebuah panti rehabilitasi untuk mengobati penderita gangguan jiwa yang dikelola oleh umat Muslim, kegiatan donor darah, kemudian melakukan kegiatan semacam festival *vegetarian food* dan perayaan Cap Go Meh bersama.

Sekolah Maitreya Wira Batam Terbuka untuk Umum

Sekolah Maitreyawira Batam adalah sekolah swasta berfalsafah Budhisme Maitreya pertama di Batam, didirikan pada tanggal 17 Juli 2004 dan diresmikan oleh Para Pandita Buddhisme Maitreya, Ketua Otorita Batam: Ismeth Abdullah dan Wali Kota Batam: Bapak Nyat Kadir. Sekolah Maitreyawira Batam adalah sekolah swasta yang mengambil konsep Budaya Maitreyani dan Pola Pikir Budaya Kasih Alam sebagai pedoman dalam mendidik generasi bangsa, menjadikan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya yakni berperilaku baik, berpola pikir arif bijaksana, berwawasan luas, dan berkehidupan bahagia. Sekolah Maitreyawira Batam terdiri dari tingkat KB-TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

Tabel 1
Jumlah Siswa Sekolah Maitreya Wira Batam Tahun Pelajaran 2013/2014

No	Tingkat	Jumlah
1	Kelompok Belajar	85
2	Taman Kanak-Kanak	354
3	Sekolah Dasar	1.047
4	Sekolah Menengah Pertama	383
5	Sekolah Menengah Atas	200
Total		2.069

Tabel 2
Jumlah Siswa Tingkat Berdasarkan Agama

No	Tingkat	Agama						
		Maitreya	Budha	Konghucu	Islam	Protestan	Katolik	Hindu
1	KB/TK	290	118	0	10	12	7	2
2	SD	523	439	28	23	21	10	3
3	SMP	318	29	0	6	24	5	1
4	SMA	141	52	0	1	1	5	0
Jumlah		1272	638	28	40	58	27	6

Tabel 3
Jumlah Siswa Sekolah Maitreya Wira Batam Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Prosentase
1	Budha Maitreya	1272	(61.4%)
2	Budha Umum	638	(30.8%)
3	Konghucu	28	(1.35%)
4	Islam	40	(1.93%)
5	Protestan	58	(2.80%)
6	Katolik	27	(1.30%)
7	Hindu	6	(0.28%)
Total		2069	100%

Tabel 4
Jumlah Guru dan Pegawai Sekolah Maitreya Wira Batam Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Budha Maitreya	102
2	Budha Umum	8
3	Islam	58
4	Protestan	23
5	Katolik	11
Total		202

Dengan adanya sekolah Maitreya Wira berfalsafah Budhisme Maitreya di bawah naungan yayasan Pancaran Maitri yang menginduk pada Majelis Pandita Buddha Maitreya Batam ini ikut juga membantu program pemerintah dalam membina kerukunan antar umat beragama, ini bisa dilihat dari siswanya yang bukan hanya berasal dari agama Buddha Maitreya saja tetapi berasal dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Konghucu, begitu pula staf pengajar dan pegawainya. Para siswa, staf pengajar dan seluruh pegawai yang

ada di sekolah maitreya Wira dapat hidup berdampingan walaupun dengan latar belakang agama yang berbeda (pengamatan peneliti pada saat berada disekolah Maitreya Wira).

Sekolah Maitreyawira berpegang pada konsep "Dunia Satu Keluarga," menciptakan peradaban baru, budaya baru. Tidak mendiskriminasikan perbedaan suku, agama, dan budaya di antara sesama rekan kerja. Setiap guru dan karyawan hidup bersukacita, saling menghormati, bertenggang rasa, bersatu hati mewujudkan visi dan misi sekolah.

Sejak berdiri, Sekolah Maitreyawira senantiasa menjunjung dan mempropagandakan misi "Mengasihi Setiap Bentuk Kehidupan". Menjadikan vegetarian sebagai pola hidup makan di Sekolah Maitreyawira adalah pilihan yang bijaksana untuk mendidik sekaligus mengembangkan pola hidup "Mengasihi Setiap Bentuk Kehidupan" dalam diri setiap karyawan, guru, dan peserta didik. Menu vegetarian yang disajikan di kantin sekolah: Sehat, Lezat, Higienis, Variatif.

Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh para siswa di sekolah Maitreya Wira Batam ini tidak hanya ditujukan untuk umat Buddha saja, tetapi bersifat umum untuk membantu siapa saja yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang agama, suku, etnis, sehingga masyarakat Batam pada umumnya bisa merasakan keberadaan dari sekolah Maitreya Wira ini.

Kegiatan-Kegiatan Sosial Mapanbumi Kota Batam

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam ini adalah kegiatan yang langsung turun ke lapangan membantu sesama manusia yang membutuhkan tidak memandang suku, agama, etnis bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat bawah, sehingga bisa memupuk rasa persaudaraan yang lebih erat, dan pada prinsipnya Mapanbumi Kota Batam membantu sesuai dengan kemampuan kepada siapa saja yang membutuhkan, karena pada prinsipnya adalah dunia satu keluarga, ini akan lebih bermanfaat dan mengena daripada hanya dialog-dialog di tingkat tokoh agama saja walaupun itu juga penting untuk saling mengkoordinasikan apabila ada permasalahan-permasalahan menyangkut keagamaan (wawancara dengan sekretaris umum Mapanbumi Kota Batam Pandita Liyas Masri tanggal 27 Maret 2014).

Kegiatan sosial yang dilakukan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam pada tahun 2011 adalah membantu panti rehabilitasi Al-Fateh, yang beralamat di Nongsa Kota Batam yang notabenenya adalah panti rehabilitasi yang dikelola oleh umat Muslim yang di dalamnya adalah pengobatan atau rehabilitasi bagi warga masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Bantuan yang diberikan adalah ikut dalam pembangunan tempat atau asrama bagi para penderita gangguan jiwa yang belum selesai. Dalam hal ini Mapanbumi Kota Batam tidak memilah-milah memberi bantuan hanya kepada umat Budha Maitreya saja tetapi juga bagi siapa saja dari umat agama lain yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.

Di samping itu, ada juga kegiatan donor darah yang diadakan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya, yang dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk membantu bagi orang-orang yang membutuhkan darah, kegiatan ini dilakukan di sekretariat Mapanbumi Kota Batam yang berada di komplek Maha Vihara Buddha Maitreya yang biasanya diikuti oleh pengurus dari Mapanbumi sendiri, para staf pengajar, para siswa sekolah Maitreya Wira dan warga masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya untuk membantu sesama yang membutuhkan.

Selain itu, juga ada kegiatan festival *vegetarian food* yang diadakan oleh Mapanbumi Kota Batam yang diadakan di restoran vegetarian yang berada di komplek Maha Vihara Buddha Maitreya Kota Batam, yang kegiatan ini terbuka untuk umum, tidak hanya diikuti oleh umat Buddha Maitreya saja tapi siapa saja boleh mengikuti kegiatan festival *vegetarian food* ini. Dengan dibuka untuk umum siapa saja boleh mengikuti kegiatan ini maka diantara warga masyarakat Kota Batam tidak ada sekat-sekat perbedaan walaupun latar belakang agama, suku dan budaya yang berbeda, sehingga dengan diadakan kegiatan ini dapat memupuk rasa persaudaraan diantara masyarakat Kota Batam.

Perayaan Cap go Meh juga diadakan oleh Mapanbumi Kota Batam. Kegiatan ini juga diikuti oleh semua unsur, baik dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Batam. Dengan perayaan Cap Go Meh bersama ini diharapkan agar semua unsur baik pemerintah dan masyarakat yang ada di Kota Batam dapat berbaur bersama-sama, sehingga memupuk rasa persaudaraan saling mengenal satu sama lain, dapat hidup

berdampingan secara harmonis dan tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang bisa menciptakan perpecahan.

Dengan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam, yang melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun masyarakat, maka diharapkan tercipta suasana yang rukun dan damai di antara masyarakat yang ada di Kota Batam walaupun berbeda suku, etnis, budaya dan agama. Dengan demikian, tidak ada lagi sekat-sekat atau dinding pemisah di antara warga masyarakat Kota Batam mereka bisa berinteraksi berbaaur saling menyayangi, tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan temuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam memandang kerukunan umat beragama sebagai hal yang harus diperjuangkan oleh semua manusia, tidak memandang latar belakang agama, suku, etnis dan budaya, karena pada prinsipnya semua makhluk satu keluarga.
2. Program atau kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Kota Batam yang mencerminkan kerukunan umat beragama adalah dengan adanya sekolah Maitreya Wira yang merupakan sekolah yang

berfalsafah Budhisme tetapi di dalamnya tidak hanya menerima para siswa yang beragama Buddha Maitreya saja, tetapi juga menerima siswa dari latar belakang agama yang berbeda. Para staf pengajar dan pegawainya juga mempunyai latar belakang agama yang berbeda. Di samping itu, juga ada kegiatan-kegiatan sosial, seperti membantu sebuah panti rehabilitasi penderita gangguan jiwa Al-Fateh yang notabenenya dikelola oleh umat Islam, kegiatan donor darah, perayaan-perayaan keagamaan yang melibatkan masyarakat umum, sehingga warga masyarakat Kota Batam dapat bergaul dan berinteraksi dengan tidak ada sekat-sekat atau dinding pemisah karena pada prinsipnya semua manusia adalah saudara dan tidak membedakan latar belakang agama.

Kepada Kementerian Agama Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam untuk lebih memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Kota Batam dengan melakukan pembinaan, sehingga lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Kota Batam bisa berfungsi sebagai suatu lembaga keagamaan yang selain sebagai wadah perwakilan dari umatnya juga bisa berperan sebagai alat pemersatu interenal umat agamanya dan juga dengan umat agama lain. Tidak dipungkiri ada sebagian lembaga keagamaan yang ada di Kota Batam yang mati suri atau vakum tidak ada kegiatan sama sekali dan hanya labeling saja, ini sesuai dengan temuan peneliti di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ali, Haidlor. 2010. *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag.
- Djam'an, Satori, Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- DPP Mapanbumi. 1994. *Kenangan Peresmian Pusdiklat Buddhis Maitreyawira*.
- Kholiludin, Tedi. 2009. *Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: Rasail Media Grup.
- Lawer, H. Robert. 1987. *Perspicitive on Social Change*. (Edisi Indonesia); terjemahan Alimandan. Jakarta: Bina Aksara.
- Norris, Pippa. Inglehart, Ronald. 2009. *Sekularisasi Ditinjau Kembali: Agama dan Politik di Dunia Dewasa ini*. Jakarta: Alvabet dan Paramadina.
- O'DEA, Thomas F. 1996. *Sosiologi Agama (Suatu Pengenalan Awal)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.
- Ricklefs, C. M. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*. Jakarta: Serambi.
- Ritzer, George. 1992. *Sociologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Terjemahan Alimanda). Jakarta: Rajawali Press.
- RPJMN 2010 -2014 Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Tim Peneliti Kehidupan Keagamaan Balai Litbang Agama Makassar. 2009. *Potensi Organisasi Sosial Keagamaan*. Makassar: Camar.
- Tim. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Zamroni. 1988. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.

